

ABSTRAK

Pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh problematika yang terjadi berulang kali terhadap TKI di Malaysia, dimana para TKI masih belum atau kurang memahami prosedur pelaporan dan permohonan perlindungan hukum untuk mereka. Terbukti dengan adanya beberapa TKI yang secara terus menerus disiksa atau diperlakukan kurang baik oleh majikannya dan Perwakilan Republik Indonesia baru mengetahui beberapa waktu setelah kejadian tersebut terjadi. Inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan seperti demikian. Rumusan Masalah : Hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi TKI, Hambatan dan upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Republik Indonesia terhadap perlindungan TKI

Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian : 1. Hukum yang berlaku bagi TKI yang berada di Malaysia adalah hukum negara Malaysia. Hal ini tertera di dalam Pasal 6 dan 7 *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) tentang Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. 2. Perlindungan hukum bagi TKI oleh Perwakilan Republik Indonesia meliputi Perlindungan Teknis, berupa penyediaan rumah singgah/penampungan dan repatriasi/pemulangan korban ke Indonesia. Perlindungan Yuridis, berupa bantuan hukum dan kemanusiaan terhadap korban yang menghadapi proses hukum baik dalam jalur pengadilan maupun melalui jalur diluar pengadilan. Perlindungan Politis, dengan disepakatinya MoU antara negara Indonesia dengan Malaysia dan dilakukannya kerjasama regional di kawasan ASEAN sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi. 3. Hambatan yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI dapat berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Malaysia terdiri dari upaya intern melalui pembenahan atau kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri dan upaya ekstern yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait di Malaysia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TKI, Perwakilan RI

ABSTRACT

The making of this thesis is motivated by the problems that occur repeatedly to Indonesian labor migrants in Malaysia, where migrant workers still do not or do not understand the reporting procedures and requests for legal protection for them. Evidenced by the existence of several Indonesian migrant workers who are continuously tortured or ill-treated by their employers and representatives of the Republic of Indonesia only know some time after the incident occurred. This is the task for the government to solve such problems. Formulation of the Problem: 1. Which law applies to Indonesian labor migrants in Malaysia. 2. How is the implementation of legal protection for Indonesian labor migrants. 3. obstacles and efforts taken by the Republic of Indonesia's representatives on the protection of Indonesian labor migrants

The research method used is the normative juridical approach.

Research results: 1. The law that applies to Indonesian migrant workers in Malaysia is the law of Malaysia. This is stated in articles 6 and 7 of the Memorandum of Understanding concerning Indonesian Domestic Workers in Malaysia signed by the Indonesian government and the Malaysian government. 2. Legal protection for Indonesian migrant workers by the Representative of the Republic of Indonesia includes Technical Protection, in the form of providing shelter and repatriation / return of victims to Indonesia. Juridical protection, in the form of legal and humanitarian assistance to victims who face legal proceedings both in court proceedings and through out-of-court channels. Political Protection, with the agreement on the MoU between Indonesia and Malaysia and regional cooperation in the ASEAN region so as to minimize cases that occur. 3. The obstacles faced by the Diplomatic Representative of the Republic of Indonesia in the context of providing protection for Indonesian labor migrants can be in the form of juridical barriers and non-juridical barriers . The efforts taken by the Diplomatic Representative of the Republic of Indonesia in providing protection for Indonesian labor migrants in Malaysia consist of internal efforts through improvement or cooperation with related institutions in the country and external efforts carried out through cooperation with related parties in Malaysia.

Keywords : Legal protection, Indonesian Migrant Workers, Indonesian Representatives